

Analisis Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Perspektif Ekonomi Politik

Orce Kabunggul¹, Muhammad Ali², Mustamin H Idris³, Muhammad Aprian Jailani⁴, Muhaimin⁵

^{1,5} Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Teknologi Surabaya

^{2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram

Email; orce.kabunggul@utssurabaya.ac.id, khaidiralihsan@gmail.com, mustamin@ummat.ac.id, Aprian.jaelani@ummat.ac.id dan muhaimin@utssurabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam perspektif ekonomi politik. Kajian ini mengangkat tiga pertanyaan utama, yaitu mengapa kemiskinan di NTT sulit diturunkan, mengapa elite politik belum cukup berpihak pada masyarakat miskin, serta apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan kemiskinan di NTT dalam kerangka ekonomi politik, dengan manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa pascasarjana serta landasan bagi penelitian selanjutnya. Sasaran akhirnya adalah mendukung strategi pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui observasi dan diskusi, serta data sekunder dari BPS NTT (22 kabupaten/kota), media massa, dan sumber lain. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pemerintah belum sepenuhnya memprioritaskan kelompok miskin. Data persentase penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (2020–2022) menegaskan adanya persoalan struktural seperti korupsi, keterbatasan sumber daya alam, rendahnya akses pendidikan, pengangguran, perubahan iklim, serta keterbatasan layanan kesehatan. Realisasi APBD 2021 juga memperlihatkan ketergantungan besar terhadap transfer pusat, sehingga kebijakan daerah belum pro-poor. Penelitian ini menyimpulkan perlunya indikator realistis dan pendekatan multidisipliner dalam merancang program pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah.

Kata-kata kunci : Kemiskinan, NTT, Ekonomi Politik.

Abstract

This research examines poverty in East Nusa Tenggara (NTT) from the perspective of political economy. The study raises three central questions: why poverty in NTT remains difficult to reduce, why political elites are not sufficiently pro-poor, and whether the regional budget (APBD) truly supports poverty alleviation. The purpose of this research is to provide a deeper understanding of poverty in NTT within the framework of political economy, while its benefits include serving as a useful reference for postgraduate students and guiding future studies. The ultimate objective is to contribute to poverty reduction strategies that are more inclusive and effective. The research applies a quantitative approach, combining primary data obtained through observations and discussions with

secondary data from BPS NTT covering 22 districts/cities, media reports, and other relevant sources. Data analysis follows the Miles and Huberman model in Sugiyono (2014), which consists of data collection, data reduction, and conclusion drawing. The findings indicate that government decision-making has not fully prioritized poor communities. Evidence from the poverty rate and Human Development Index (2020–2022) highlights persistent structural problems, including corruption, limited natural resources, inadequate education, unemployment, climate change, and poor access to healthcare. Furthermore, the 2021 regional budget shows that most district revenues rely heavily on central government transfers, limiting pro-poor policy initiatives. This research concludes that effective poverty alleviation requires realistic indicators and a multidimensional approach involving economics, public policy, sociology, and anthropology.

Keywords: Poverty, NTT, Economic and Political..

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan realitas sosial yang seolah sulit dihindari sekaligus sulit diberantas. Indonesia yang dikenal kaya akan sumber daya alam tetap tidak terlepas dari persoalan ini, bahkan sejak masa kolonial hingga masa kini. Berbagai bencana, baik yang bersifat alamiah maupun akibat ulah manusia seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, semburan lumpur Lapindo, hingga kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap semakin memperparah potret panjang persoalan kemiskinan di negeri ini.

Di Indonesia, kemiskinan menyebar luas layaknya virus berbahaya, meliputi wilayah perkotaan hingga pedesaan, mulai dari kelompok pengangguran hingga komunitas nelayan. Persoalan ini terlalu kompleks untuk dipahami secara sederhana maupun dituntaskan sepenuhnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya beragam definisi mengenai kemiskinan, sehingga sulit dirumuskan ukuran yang seragam. Bagi Indonesia, kemiskinan tetap menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Meski telah banyak dirancang berbagai program, strategi, dan inisiatif pembangunan untuk menekan jumlah penduduk miskin, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Ketimpangan distribusi kapasitas ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu ikut terlibat dalam pembangunan maupun menikmati hasilnya, yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan.

Todaro (1997) menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya variasi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) kondisi geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan yang berbeda; (2) latar belakang historis, khususnya pengalaman sebagian masyarakat yang pernah mengalami penjajahan; (3) ketersediaan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia yang beragam; (4) perbedaan dalam peran negara dan sektor swasta; (5) struktur industri yang tidak seragam; (6) tingkat ketergantungan pada kekuatan politik dan ekonomi negara lain; serta (7) perbedaan kelembagaan internal, struktur politik, dan

dinamika kekuasaan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan wawancara terkait analisis kemiskinan di NTT dalam perspektif ekonomi politik, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Persoalan kemiskinan sendiri merupakan fenomena sosial yang terjadi hampir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Untuk menanggulangnya, pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan, salah satunya melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada tahun 2005 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005. Tim ini memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan, dengan tujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal 2). Adapun kepemimpinan TKPK berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang terus berjuang mengatasi kemiskinan dan penanggulangannya. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi, yakni sebesar 20,23 persen pada September 2022, naik 0,18 poin persentase dari Maret 2022 dan turun 0,21 persen dari September 2021. Jumlah penduduk miskin per September 2022 mencapai 1,15 juta jiwa, naik 17,6 ribu jiwa. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 8,84 persen, pada September 2022 angka tersebut meningkat menjadi 9,00 persen. Persentase penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 23,86 persen pada Maret 2022 menjadi 24,11 persen pada September 2022.

Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih banyak 4,6 ribu jiwa dibandingkan Maret 2022 (dari 126,80 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 131,202 ribu jiwa pada September 2022). Pada kurun waktu yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan meningkat sebanyak 13 ribu jiwa (dari 1.004,83 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 1.017,81 ribu jiwa pada September 2022). Pada September 2022, garis kemiskinan sebesar Rp490.909 per bulan per penduduk, dengan rincian Rp380.566 (77,52 persen) untuk makanan dan Rp110.343 (22,48%) untuk bukan makanan. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kabupaten NTT pada bulan September 2022 sebanyak 5,45 jiwa. Dengan demikian, rata-rata batas kemiskinan per rumah tangga miskin per bulan adalah sebesar Rp2.675.454 (BPS NTT, 2023a).

(Suwartana, 2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepala rumah tangga bekerja pada subsektor padi dan palawija (71,8%), dengan rentang usia 40–59 tahun (52,13%), berjenis kelamin laki-laki (84,7%), serta berpendidikan dasar atau sederajat (42,41%). Sebagian besar memiliki jumlah anggota rumah tangga kurang dari lima orang (53,34%), tinggal di wilayah perdesaan (96,08%), dan beraktivitas di sektor informal (97,28%). Analisis regresi logistik biner selanjutnya mengungkap bahwa beberapa variabel berpengaruh signifikan terhadap status

kemiskinan kepala rumah tangga pertanian di Provinsi NTT, yaitu lokasi tempat tinggal, usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status pekerjaan, lama jam kerja, akses terhadap kredit, serta pemanfaatan internet dalam tiga bulan terakhir.

Wajar saja, mengingat NTT memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, hal ini sangat memprihatinkan. Selain itu, dengan mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, Pemerintah NTT lebih mengutamakan sektor pariwisata daripada sektor pertanian. Secara umum, sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan petani, seperti terbatasnya akses terhadap keuangan, teknologi, dan input, harga yang tidak stabil, serta manajemen organisasi yang kurang memadai. Pendapatan petani yang rendah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang sebagian pro petani merupakan faktor lain yang menyebabkan kemiskinan masyarakat pertanian. Pertanyaannya sekarang adalah: mengapa kemiskinan di NTT sulit diberantas? Mengapa elit politik tidak pro terhadap kemiskinan? Apakah APBD pro terhadap masyarakat miskin? Jika negara tidak dapat menyatakan perang terhadap kemiskinan, memerangi korupsi, dan terlalu malas untuk menjalankan agenda reformasi yang diamanatkan konstitusi, kemiskinan negara era kolonial akan selamanya menjadi simbol bangsa ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Objek kajian difokuskan pada fenomena kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta keterkaitannya dengan ekonomi politik. Sumber utama berasal dari literatur berupa kamus, buku, serta jurnal-jurnal yang membahas isu kemiskinan di NTT dan ekonomi politik. Sementara itu, sumber sekunder meliputi data statistik resmi seperti publikasi BPS NTT dan dokumen pendukung lainnya.

Proses pengolahan data dilakukan melalui analisis terhadap sumber primer dan sekunder yang kemudian ditafsirkan tanpa mengubah makna aslinya. Teknik analisis data melibatkan beberapa tahapan: **pertama**, membaca dan memahami berbagai referensi; **kedua**, melakukan pembacaan ulang untuk mulai memberikan penafsiran; dan **ketiga**, mencatat data maupun informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian.

Hasil dari kajian kepustakaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT merupakan fenomena aktual yang terus menggerus kehidupan masyarakat dan menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan ekonomi politik berupaya mengintegrasikan seluruh aspek administrasi politik dengan aktivitas ekonomi, baik yang dijalankan masyarakat

maupun yang diprakarsai pemerintah. Dalam pendekatan ini, dimensi politik ditempatkan sebagai subordinat dari dimensi ekonomi. Indikator-indikator ekonomi, seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi, dianalisis dalam kerangka sistem politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, ekonomi dipandang sebagai sarana bertindak (*a way of acting*), sedangkan politik berfungsi sebagai arena tempat tindakan itu berlangsung (*a place to act*) (Caporaso & Levine, 1993:31). Fokus utama pendekatan ini adalah menjelaskan perilaku ekonomi para aktor ketika mereka terlibat dalam aktivitas politik. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari analisis mengenai praktik *rent-seeking* yang banyak ditemukan di negara-negara dunia ketiga (Kuntjoro-Jakti, 1990:6).

Landasan awal teori ekonomi politik menyatakan bahwa setiap kelompok kepentingan berusaha memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan usaha sekecil mungkin. Dalam konteks tersebut, segala sumber daya ekonomi politik, termasuk aktivitas lobi, akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ketika lobi menghasilkan sebuah kebijakan, dampaknya dapat sangat signifikan. Olson menekankan bahwa praktik lobi yang berlebihan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, sehingga menghambat kemampuan ekonomi dalam merespons dinamika perubahan maupun perkembangan teknologi (Olson, 1982:46 dalam Dasgupta, 1998:26).

Secara konseptual, kemiskinan dipahami sebagai persoalan ekonomi sekaligus sosial. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan sering direduksi pada keterbatasan pendapatan atau konsumsi kalori individu. Sementara itu, pendekatan sosial memandangnya sebagai keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akibat rendahnya keterampilan, pendidikan, atau adanya eksklusif sosial (Oktavianti, 2008).

Kajian teoritis menunjukkan bahwa definisi dan pengukuran kemiskinan dapat dibagi ke dalam empat perspektif. Pertama, *pendekatan moneter*, yang menilai kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan minimum konsumsi atau berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini populer karena sederhana dan mudah diterapkan, baik secara nasional maupun internasional. Kedua, *pendekatan kapabilitas*, yang menekankan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai ekspansi kemampuan manusia. Dalam kerangka ini, kemiskinan berarti kehilangan atau kegagalan individu memenuhi kapabilitas dasar, seperti kesehatan, pendidikan, daya tahan tubuh, imajinasi, serta relasi sosial.

Ketiga, *pendekatan eksklusif sosial*, yang berkembang di negara maju untuk menjelaskan proses marginalisasi dan pencabutan hak dasar. Di Eropa, hal ini dikaitkan dengan pengangguran, keterbatasan perumahan, pendapatan minimum, hak kewarganegaraan, dan partisipasi sosial. Seiring waktu, model ini juga diadopsi negara berkembang seperti India, Tunisia, dan Tanzania (Laderich et al.

dalam Yustika, 2007). Keempat, *pendekatan partisipatif*, yang diperkenalkan Chambers, melibatkan masyarakat miskin secara langsung dalam mendefinisikan dan menilai kondisi kemiskinan melalui *participatory poverty assessment (PPA)*. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan, peningkatan efektivitas program, dan pembelajaran bersama, meski implementasinya cukup kompleks karena melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Selain keempat pendekatan tersebut, terdapat tiga penyebab utama kemiskinan: struktural, yang dekat dengan eksklusi sosial akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat miskin (Soemardjan, 1979); sumber daya, yang menekankan keterbatasan akses terhadap aset ekonomi dan alam; serta kultural, yang mengaitkan kemiskinan dengan sikap atau mentalitas individu. Pada akhirnya, diskursus ini bermuara pada dua bentuk utama: kemiskinan absolut, yakni kondisi di bawah garis kemiskinan; dan kemiskinan relatif, yaitu kesenjangan akibat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Umumnya, program pengentasan lebih difokuskan pada kelompok yang berada dalam kategori absolut.

Keadaan Geografis dan Administratif Provinsi NTT

Nusa Tenggara Timur, sering disebut sebagai NTT, adalah salah satu dari 34 provinsi Indonesia di bagian timur kepulauan Indonesia. Pada awal sejarah kemerdekaan Republik Indonesia (Eka Mandala, 2021). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang berada di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara, dengan ibu kota di Kota Kupang. Wilayah ini terbagi ke dalam 22 kabupaten/kota yang tersebar di Kepulauan Sunda Kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk NTT mencapai 5.446.285 jiwa dengan kepadatan sekitar 114 jiwa/km². Provinsi ini terdiri atas kurang lebih 1.200 pulau, dengan tiga pulau utama yakni Flores, Sumba, dan Timor bagian barat. Pulau-pulau besar lain di antaranya adalah Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Ende, dan Komodo. Secara historis, wilayah ini dikenal dengan istilah “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor, dan Alor).

Jumlah penduduk NTT pada tahun 2010 tercatat 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan 2,07% per tahun, terdiri dari 2.326.487 laki-laki dan 2.357.340 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk saat itu sekitar 96 jiwa/km², dengan distribusi 20% tinggal di perkotaan dan 80% di pedesaan. Dari sisi agama, mayoritas penduduk menganut Kekristenan (90,56%) yang terdiri dari Katolik (53,74%) dan Protestan (36,82%). Selain itu, terdapat pemeluk Islam (9,25%), Hindu (0,18%), Buddha (0,01%), serta kepercayaan lokal seperti Marapu di Pulau Sumba.

Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah menengah di NTT masih rendah, yakni hanya 39% pada tahun 2003/2004, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 80,49% (UNESCO). Kondisi akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang terbatas berkontribusi pada tingginya angka gizi buruk (32%) serta angka kematian bayi (71 per 1.000 kelahiran), yang relatif lebih besar dibandingkan

sebagian besar provinsi lain di Indonesia. (Wikipedia, 2023).

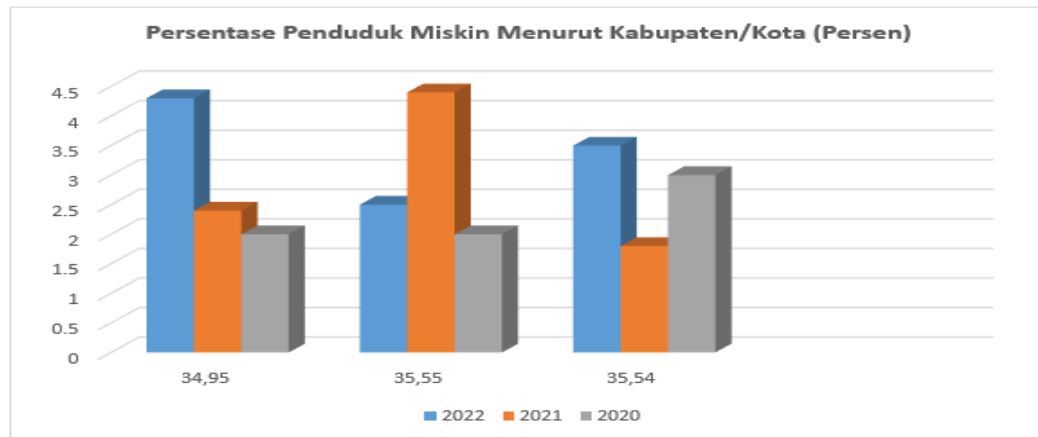
Gambar 1. Geografis NTT



Sumber gambar: <https://www.pinhome.id/blog/peta-ntt/>

Kemiskinan Di NTT

Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik pangan maupun nonpangan, yang diukur melalui besaran pengeluaran. Dengan demikian, seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data rujukan dari BPS NTT

Pada gambar 2 di atas Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen) pada tahun 2020 dengan jumlah 35,54 % Jiwa, 2020 jumlah 35,55 % Jiwa mengalami kenaikan satu angka berbeda di tahun 2022 mengalami penurunan lagi 34,95 % Jiwa. Provinsi termiskin ketiga ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan persentase penduduk miskin mencapai 20,23 persen per September 2022. (BPS NTT, n.d.-b). terbukti bahwa pemerintah NTT dan dinas terkait, tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan ironisnya menjadi salah satu penyebab kemiskinan adalah Pertama korupsi. Di kutip di (Yance Jengamal, 2022) “Provinsi NTT masih menempati urutan ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kemiskinan di NTT adalah korupsi yang dilakukan para pengelola keuangan atau anggaran. Beberapa faktor utama masih menjadi penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

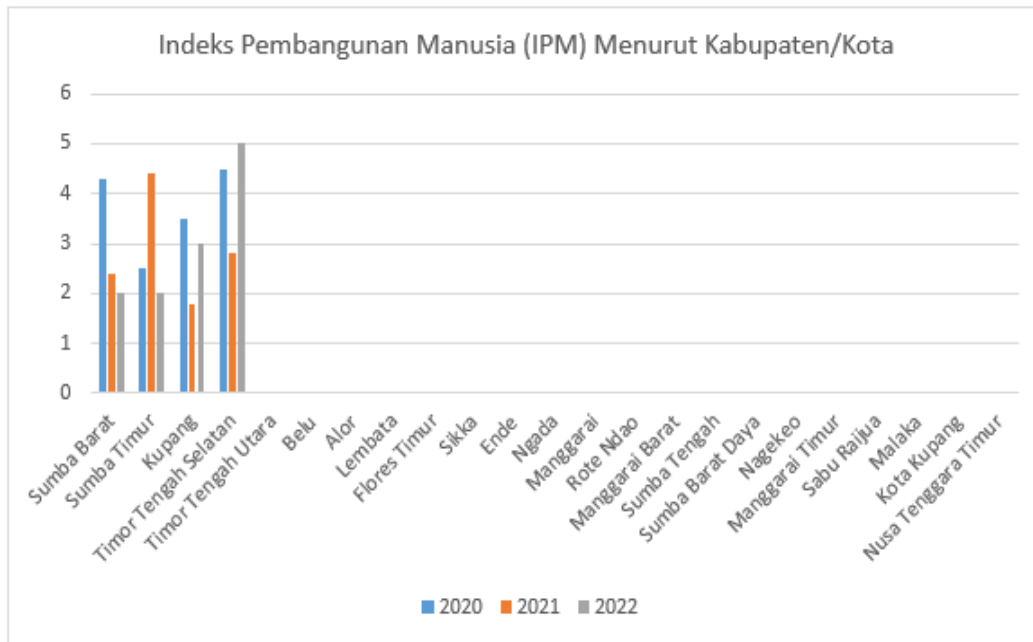
Pertama, praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah provinsi hingga desa, menghambat pengelolaan keuangan daerah secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada tingginya angka kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT (Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Kupang, 19 Oktober 2022). Kedua, keterbatasan sumber daya alam. Kondisi geografis NTT yang gersang serta minimnya ketersediaan air bersih membuat masyarakat kesulitan bercocok tanam. Selain itu, daerah pesisir rentan terhadap bencana kekeringan dan banjir yang memperburuk kondisi ekonomi.

Ketiga, rendahnya akses pendidikan. Banyak anak putus sekolah karena jarak sekolah yang jauh dari permukiman, biaya transportasi yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Keempat, kurangnya lapangan pekerjaan.

Minimnya industri, usaha mikro, dan sektor formal menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada pertanian dan perikanan dengan pendapatan rendah. Kelima, perubahan iklim yang memicu bencana kekeringan maupun banjir, merusak infrastruktur, dan mengganggu sektor pertanian serta perikanan sebagai sumber utama penghidupan. Keenam, terbatasnya akses layanan kesehatan. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan turut memperparah kerentanan penduduk terhadap penyakit. (Wara, 2023).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, antara lain memperluas akses pendidikan yang berkualitas, menciptakan peluang kerja baru, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok desa. Di sisi lain, tanggung jawab kepala daerah baik gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD, maupun pimpinan OPD harus diperkuat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan anggaran agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan.

Selain itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal, misalnya melalui pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha kecil menengah (UKM), serta penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai basis utama perekonomian daerah. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam program pembangunan, baik melalui partisipasi sosial maupun pengawasan terhadap jalannya kebijakan publik. Dengan adanya sinergi antara pemerintah yang transparan dan masyarakat yang partisipatif, diharapkan kesejahteraan masyarakat NTT dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.



Gambar 3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022

Sumber: diolah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Menurut (Andrean W. Finaka, 2020) Pembangunan manusia menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. Sehingga disimpulkan pada gambar 3 di atas Pada tahun 2020 IPM Kupang kategori tinggi sebesar 79,71 %, di tahun 2021 Angka ini naik 3 point masih kategori tinggi 79,74% kemudian tahun 2022 naik drahtis masuk kategori sangat tinggi 80,20 % dibandingkan dengan IPM di kabupaten lain di NTT (BPS NTT, n.d.-a).

Grafik IPM Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020-2022 menunjukkan adanya tren peningkatan di hampir semua wilayah. Kota Kupang menempati posisi dengan IPM tertinggi, sedangkan beberapa kabupaten seperti Flores Timur dan Alor berada pada posisi lebih rendah. Walaupun peningkatan tidak merata, pola ini menegaskan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Data terbaru BPS memperkuat temuan ini, di mana IPM NTT meningkat dari 65,90 (2022) menjadi 68,40 (2023), lalu naik lagi menjadi 69,14 pada tahun 2024 (BPS NTT, 2024).

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Misalnya, (Firmansyah, 2024) menemukan bahwa belanja sektor pendidikan berpengaruh

signifikan terhadap peningkatan IPM di NTT, sementara kesehatan dan infrastruktur juga memberi kontribusi bila dilihat secara simultan. Penelitian lain oleh (Bulu, 2023) menegaskan bahwa IPM dan tingkat melek huruf menjadi faktor penting dalam menurunkan kemiskinan di NTT. Sementara itu, studi di Kabupaten Manggarai (Nelsi, 2024) menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor dominan yang meningkatkan IPM.

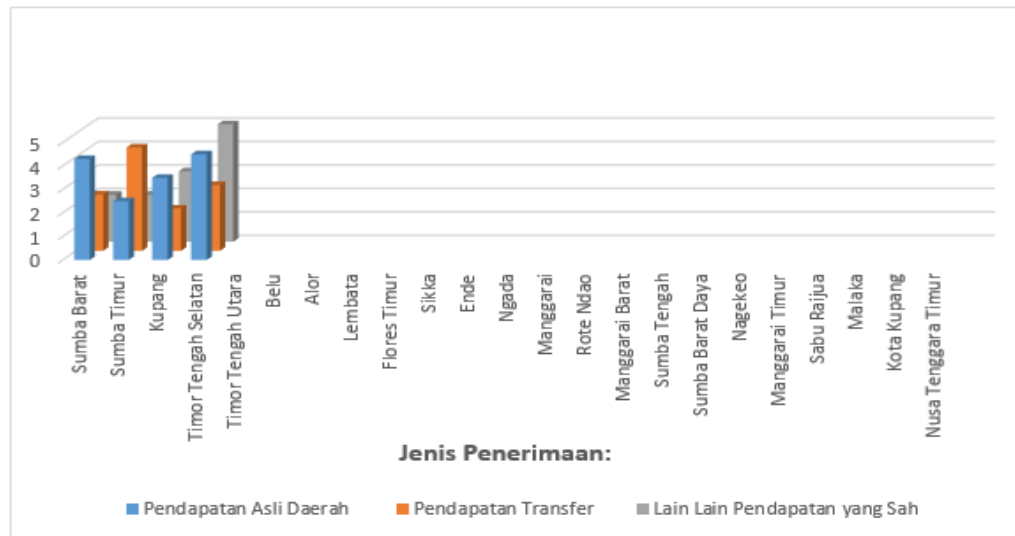
Berdasarkan hasil grafik, data BPS terbaru, dan dukungan penelitian terdahulu, penulis menilai bahwa peningkatan IPM di NTT merupakan hasil nyata dari perbaikan akses pendidikan dan layanan kesehatan, disertai dukungan kebijakan pembangunan daerah. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang perlu diperhatikan, khususnya di kabupaten dengan capaian IPM rendah. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan harus lebih menekankan pada pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup agar tren positif IPM dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh NTT.

Peran Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan

Berdasarkan kerangka Caporaso & Levine (1993), ekonomi dipandang sebagai sarana bertindak sementara politik menyediakan ruang bagi tindakan tersebut. Artinya, kebijakan ekonomi termasuk pengelolaan APBD tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik aktor yang memiliki otoritas. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana elit politik benar-benar berpihak pada masyarakat miskin?

Struktur APBD NTT menunjukkan bahwa penerimaan daerah umumnya bersumber dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Namun, porsi terbesar masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas, sementara penggunaan anggaran sangat dipengaruhi oleh orientasi politik para pengambil kebijakan. Jika elit politik tidak menempatkan masyarakat miskin sebagai prioritas, maka alokasi anggaran berpotensi lebih banyak diarahkan pada kepentingan birokrasi atau pembangunan fisik semata, bukan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Dengan demikian, sesuai teori ekonomi politik, relasi antara ekonomi dan politik menjadi penentu apakah APBD benar-benar menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan atau justru memperlebar kesenjangan sosial di NTT.



Gambar 4. Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun 2021 Provinsi NTT

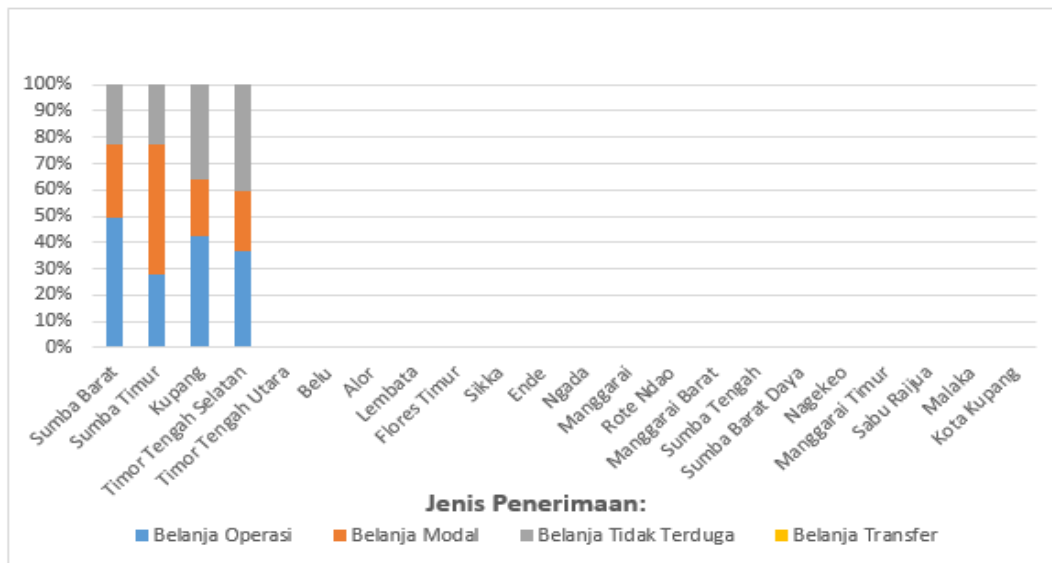
Sumber: gambar di olah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Berdasarkan data diatas pada gambar 4 dengan kriteria penerimaan sehingga di jumlahkan hasil keseluruhan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan yang Sah di 22 kabupaten yakni: Jumlah Sumba Barat, 708,565,725.00, Sumba Timur 1,128,941,818.00, Kupang 1,161,477,529.00, Timor Tengah Selatan 1,370,553,088.00, Timor Tengah Utara 994,450,427.00, Belu 853,370,052.00 Alor 1,083,381,602.00, Lembata 786,646,014.00, Flores Timur 1,063,984,332.00, Sikka 1,122,667,567.00, Ende 1,097,410,407.00, Ngada 824,193,240.00, Manggarai 1,142,348,588.00, Rote Ndao 747,540,968.00, Manggarai Barat 1,089,504,347.00, Sumba Tengah 563,142,063.00, Sumba Barat Daya 1,004,026,892.00, Nagekeo 700,702,412.00, Manggarai Timur 1,104,328,462.00, Sabu Raijua 583,834,842.00, Malaka 863,572,827.00 dan Kota Kupang 1,197,624,315.00 (BPS NTT, 2023c). Dengan demikian sebagai penulis dapat menganalisa dari data bps ntt bahwa di penerimaan di setiap kabupaten lebih besar nominal Transfer Pemerintah Pusat ini yang menjadikan bahwa pemerintah di setiap daerah tidak pro terhadap masyarakat miskin Hanya sesama penguasa yang diuntungkan alangkah dana yang besar itu lebih focus pada pembangunan daerah akan mengurangi kemiskinan di NTT. Jadi Grafik menunjukkan komposisi pendapatan daerah kabupaten/kota di NTT yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari grafik terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD relatif

rendah. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal masih terbatas. Sementara itu, penerimaan dari kategori lain-lain hanya signifikan di beberapa daerah seperti Timor Tengah Utara, namun kontribusinya tetap kecil jika dibandingkan dengan transfer pusat.

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Nasution, 2022) yang menemukan bahwa ketergantungan fiskal daerah di wilayah Indonesia Timur masih tinggi karena PAD belum mampu menopang kebutuhan belanja pembangunan (Jurnal BPPK Kemenkeu). Demikian pula, (Syahrir, 2021) menegaskan bahwa transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi sumber utama pendapatan di daerah dengan PAD rendah (Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan).

Berdasarkan hasil grafik dan dukungan penelitian terdahulu, penulis menilai bahwa ketergantungan NTT terhadap dana transfer pusat perlu segera diimbangi dengan strategi peningkatan PAD. Optimalisasi potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan dan tidak terlalu bergantung pada kebijakan fiskal dari pusat.



Gambar 5. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021
Provinsi NTT

Sumber gambar di olah peneliti berdasarkan rujukan kepustakaan

Pada gambar 5 pengeluaran daerah Belanja Operasi dimana jumlah keseluruhan kabupaten di NTT sebesar 13, 623, 254, 461.00 yaitu ada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial (BPS NTT, 2023b). Secara nyata memang benar lebih banyak di pengeluaran dengan memusatkan perhatian pada beberapa prioritas tersebut, sebenarnya ini dapat diperoleh keberhasilan dalam melawan kemiskinan dan sebagai provinsi berpenghasil dari potensi wisata laut, budaya local yang banyak diminati para wisatawan baik lokal maupun manca negara, seperti pantai dan taman laut yang indah. Dalam beberapa tahun ke depan akan meraih keuntungan dari peningkatan, NTT bisa memetik manfaat yang lebih besar lagi jika dari proses pengambilan keputusan oleh actor tepat saran.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan “NTT baru” yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin (work for the poor).

Fokus utama laporan ini adalah memberikan kontribusi bagi wacana kebijakan serta proses pengambilan keputusan di tingkat Pemerintah Daerah melalui dua cara: (1) menyajikan analisis yang lebih baru dan komprehensif terkait diagnosis empiris kemiskinan, serta (2) menawarkan rekomendasi kebijakan dan program konkret dalam bentuk rencana aksi strategis guna mewujudkan target pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Perjalanan pembangunan di NTT, baik dari sisi ekonomi maupun kebijakan dan program sosial, dapat menjadi sumber pembelajaran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 20,23 persen pada September 2022. Pemulihan ekonomi di wilayah ini sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi dan terkendalinya harga kebutuhan pokok, khususnya beras yang merupakan komoditas penting bagi masyarakat miskin. Meskipun angka kemiskinan sempat menunjukkan tren penurunan, pada awal 2023 terjadi lonjakan kembali yang cukup mengejutkan. Salah satu penyebab utamanya adalah kenaikan signifikan harga beras, termasuk beras Bulog di Pasar Naikoten, Kupang, serta di wilayah Sumba, yang naik dari Rp 9.500 per kilogram menjadi Rp 15.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada beras murah asal Sulawesi yang sebelumnya dijual Rp 9.500 kini mencapai Rp 15.000 per kilogram. Meski stok beras tersedia di pasar maupun toko sembako, kenaikan harga ini berdampak langsung pada kelompok miskin dan memicu peningkatan persentase penduduk miskin di NTT menjadi 20,23 persen antara September 2022 hingga awal 2023. (KORNELIS KEWA AMA, 14 Maret 2023)

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang menyeluruh (komprehensif) agar dapat menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada konsep pertolongan. Dalam kerangka pemberdayaan, upaya tersebut dimaknai sebagai proses membantu kelompok yang lemah atau tidak berdaya (*powerless*) agar mampu meningkatkan kapasitas fisik, mental, dan pemikiran mereka demi mencapai kesejahteraan hidup. Dalam perspektif ini, masyarakat miskin diposisikan sebagai aktor penting yang berperan langsung dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Mujiyadi dan Gunawan (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses perbaikan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada kelompok miskin. Mereka dipandang sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk berpikir dan bertindak, namun membutuhkan “penguatan” agar dapat memanfaatkan kemampuan (*power*) yang ada pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa langkah awal penanganan masalah kemiskinan perlu diawali dengan identifikasi potensi yang dimiliki keluarga miskin.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana memetakan karakteristik potensi tersebut. Dalam proses perumusan kebijakan diperlukan indikator-indikator yang realistis dan dapat dioperasionalkan ke dalam program penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus peka terhadap dinamika kemiskinan maupun kesejahteraan, baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok sosial, maupun wilayah. Kajian ilmiah mengenai faktor penyebab, mekanisme terjadinya kemiskinan, indikator-indikator gejala kemiskinan, serta dampak yang ditimbulkannya, menjadi penting dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di NTT bersama para peneliti perlu mengembangkan sistem pemantauan kemiskinan yang sesuai dengan konteks daerah, terutama dalam era otonomi saat ini. Kajian tersebut sebaiknya tidak hanya terbatas pada ilmu kebijakan publik dan ekonomi, tetapi juga melibatkan perspektif sosiologi, antropologi, dan disiplin lain yang relevan.

Daftar Rujukan

- Andrean W. Finaka. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Terus Meningkat*. Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-pembangunan-manusia-terus-meningkat#:~:text=Pembangunan manusia menurut standar United,IPM 60-79 kategori sedang>.
- BPS NTT. (n.d.-a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022*. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru->

- indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html
- BPS NTT. (n.d.-b). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022.* BPS NTT.
<https://ntt.bps.go.id/indicator/23/584/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS NTT. (2023a). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 sebesar 20,23 persen.*
<https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1151/persentase-penduduk-miskin-september-2022-sebesar-20-23-persen.html>
- BPS NTT. (2023b). *Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021.* BPS NTT.
<https://ntt.bps.go.id/statictable/2022/12/13/920/realisasi-anggaran-belanja-daerah-kabupaten-kota-tahun-provinsi-ntt-2021.html>
- BPS NTT. (2023c). *Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota Tahun Provinsi NTT 2021.* BPS NTT.
<https://ntt.bps.go.id/statictable/2023/06/08/950/realisasi-anggaran-pendapatan-kabupaten-kota-tahun-provinsi-ntt-2021.html>
- Bulu. (2023). *IPM dan tingkat melek huruf menjadi faktor penting dalam menurunkan kemiskinan di NTT.*
https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/JEPWIRA/article/view/3877?utm_source=com
- Eka Mandala. (2021). *Peta NTT lengkap 21 Kabupaten 1 Kota.* Pinhome.
<https://www.pinhome.id/blog/peta-ntt/>
- Firmansyah, A. H. (2024). *Pengaruh Belanja Pemerintah dan PDRB terhadap Peningkatan IPM di Indonesia Timur.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jrei.v5i1.13048>
- Nasution. (2022). *ketergantungan fiskal daerah di wilayah Indonesia Timur masih tinggi karena PAD.*
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/684>
- Nelsi, V. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manggarai.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.37478/jeq.v4i1.3999>
- Suwartana, I. G. M. (2022). *Determinan Status Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 19(1), 55-72.*
- Syahrir. (2021). *transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi sumber utama pendapatan di daerah dengan PAD rendah.* <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-JournalEkonomi/article/view/27468>

- Wara, A. Z. (2023). *Inilah Beberapa Penyebab Kemiskinan yang Terjadi di NTT!* Flores Editorial. <https://www.floreseditorial.com/news/3978315604/inilah-beberapa-penyebab-kemiskinan-yang-terjadi-di-ntt>
- Wikipedia. (2023). *Nusa Tenggara Timur*. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
- Yance Jengamal. (2022). *Korupsi Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan di NTT*. Victory News. <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315252778/korupsi-jadi-salah-satu-penyebab-kemiskinan-di-ntt>